

Strategi Komunikasi dalam Penanganan Polemik LCC 4 Pilar Kalimantan Barat: Perspektif Two-Way Symmetrical Communication

Communication Strategies in Managing the Controversy Surrounding the West Kalimantan Four Pillars LCC: A Two-Way Symmetrical Communication Perspective

Nur Atikah Taang*, Suryani Musi, Vika Oktasya, Nia Ramadani, Dwi Reskita Nur Atikah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

* nurfifa915@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Institutional Communication, Two-Way Symmetrical Communication, Crisis Communication, Institutional Legitimacy, Four Pillars Quiz Competition

Article History

Received: 2026-05-22
Accepted: 2026-06-29

The controversy surrounding the Four Pillars Quiz Competition (*Lomba Cerdas Cermat/LCC*) organized by the Indonesian People's Consultative Assembly (MPR RI) in West Kalimantan attracted public attention after participants questioned inconsistencies in the scoring process during the final round. The issue developed into public discourse on social media and raised concerns regarding the transparency of institutional communication in managing the conflict. This study aims to analyze institutional communication strategies in addressing the controversy through the perspective of Two-Way Symmetrical Communication. Using a qualitative library research approach, data were collected from scholarly articles, online news, institutional documents, and relevant literature on organizational communication, crisis communication, and Two-Way Symmetrical Communication. The findings show that the organizers demonstrated dialogue, feedback acceptance, and institutional adaptation; however, these practices remained partial. Communication adaptation became evident after the conflict escalated through evaluations, suspension of related parties, and public apologies, emphasizing the importance of responsive and dialogic communication strategies.

Copyright © 2026, Taang et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i1.515](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i1.515)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan media digital telah mengubah pola komunikasi antara institusi dan publik secara signifikan (Alamsyah, I. L., 2024). Informasi yang disampaikan oleh suatu institusi kini dapat dengan cepat menyebar, memperoleh respons, serta memunculkan berbagai interpretasi di ruang publik melalui media sosial dan platform digital lainnya (Azmi, N. A., 2021). Kondisi tersebut menjadikan komunikasi tidak lagi sekadar sarana penyampaian informasi, melainkan instrumen strategis dalam membangun

kepercayaan, menjaga legitimasi, serta mengelola hubungan antara institusi dan publiknya (Hamad, I., 2024). Dalam konteks ini, kemampuan institusi untuk merespons aspirasi, kritik, maupun keberatan publik secara terbuka dan responsif menjadi semakin penting, terutama ketika suatu isu berkembang menjadi perhatian masyarakat luas. Pentingnya komunikasi institusional semakin terlihat ketika suatu organisasi atau lembaga menghadapi polemik yang berkembang di ruang publik (Purwatiningsih, S. D., & Situmeang, I. V. O., 2025). Polemik tidak selalu muncul karena kesalahan substantif suatu keputusan, tetapi sering kali dipengaruhi oleh bagaimana institusi mengelola komunikasi terhadap pihak-pihak yang terdampak. Respons yang lambat, kurang transparan, atau tidak memberikan ruang dialog dapat memperbesar konflik persepsi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi. Sebaliknya, komunikasi yang dialogis dan partisipatif memungkinkan terciptanya pemahaman bersama serta membantu organisasi menjaga hubungan yang konstruktif dengan publiknya. Oleh karena itu, strategi komunikasi institusional memiliki peran penting dalam mengelola dinamika konflik dan menjaga kredibilitas organisasi di tengah perkembangan ruang digital yang semakin kompleks (Siregar, F. A., & Usriyah, L., 2021).

Fenomena tersebut relevan dengan polemik yang terjadi pada penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Polemik ini muncul setelah adanya perbedaan persepsi terkait hasil penilaian pada salah satu tahapan kompetisi yang kemudian berkembang menjadi perbincangan publik melalui media sosial dan berbagai platform digital. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada substansi perlombaan, tetapi juga pada bagaimana penyelenggara memberikan penjelasan, merespons keberatan peserta, serta mengelola komunikasi selama polemik berlangsung. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan suatu kompetisi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut kemampuan institusi dalam membangun komunikasi yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dan persepsi yang muncul. Sebagai kegiatan yang membawa nama lembaga negara, penyelenggaraan LCC Empat Pilar MPR RI memiliki tanggung jawab untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Dalam situasi polemik, komunikasi menjadi faktor yang menentukan bagaimana publik memahami suatu peristiwa serta bagaimana legitimasi institusi dipertahankan di tengah kritik dan perhatian masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang diterapkan oleh penyelenggara menjadi aspek yang penting untuk dikaji, khususnya dalam memahami bagaimana institusi merespons konflik persepsi yang berkembang di ruang publik (DetikEdu, 2026; Kompas.com, 2026; IDN Times, 2026).

Salah satu pendekatan yang relevan untuk memahami fenomena tersebut adalah *Two-Way Symmetrical Communication* yang dikembangkan oleh (Grunig dan Hunt., 1984). Model komunikasi ini menekankan pentingnya komunikasi dua arah yang seimbang antara organisasi dan publik melalui dialog, umpan balik (*feedback*), adaptasi (*adaptation*), dan upaya mencapai *mutual understanding*. Dalam model ini, organisasi tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pihak yang bersedia mendengarkan aspirasi publik, mempertimbangkan masukan yang diberikan, serta melakukan penyesuaian berdasarkan hasil interaksi yang berlangsung. Dengan demikian, komunikasi dipahami sebagai proses yang memungkinkan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas penerapan komunikasi dua arah dalam konteks hubungan organisasi dengan publik. Penelitian Vrabcová et al. (2024)

menunjukkan bahwa komunikasi simetris berperan penting dalam penyelesaian konflik organisasi melalui dialog, keterbukaan informasi, dan pengelolaan umpan balik yang efektif. Sementara itu, (Augusta et al., 2026) melalui kajian *systematic literature review* menemukan bahwa *Two-Way Symmetrical Communication* masih menjadi pendekatan yang relevan dalam membangun hubungan organisasi-publik karena menempatkan dialog dan adaptasi sebagai elemen utama komunikasi strategis.

Dalam konteks komunikasi krisis, (Frandsen., 2025) menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi dalam menghadapi kontroversi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyelesaikan persoalan substantif, tetapi juga oleh bagaimana organisasi mengelola komunikasi dengan publik selama krisis berlangsung. Di sisi lain, penelitian (Zhang dan Lu., 2025) menunjukkan bahwa komunikasi dua arah yang diterapkan institusi publik melalui media digital berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik dan legitimasi institusional. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi simetris memiliki peran penting dalam pengelolaan hubungan organisasi dengan publik, baik dalam situasi normal maupun ketika organisasi menghadapi isu dan konflik.

Meskipun kajian mengenai komunikasi simetris, komunikasi krisis, dan komunikasi institusional telah berkembang dalam berbagai konteks organisasi, penerapannya pada polemik penyelenggaraan kompetisi pendidikan oleh lembaga negara masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian menitikberatkan pada organisasi pemerintahan, korporasi, dan komunikasi digital, sehingga belum banyak menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip *Two-Way Symmetrical Communication* diterapkan ketika suatu event institusional pendidikan berkembang menjadi diskursus publik dan memerlukan respons komunikasi yang melibatkan berbagai aktor, seperti peserta, penyelenggara, juri, media, dan institusi negara (Kim, Y., 2021). Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana institusi negara mengelola komunikasi ketika menghadapi konflik persepsi yang muncul dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Pemahaman tersebut penting karena polemik yang tidak dikelola secara efektif berpotensi memengaruhi legitimasi institusi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara (Badu, E., Dkk., 2023).

Novelty penelitian ini tidak terletak pada penggunaan teori *Two-Way Symmetrical Communication* semata, melainkan pada upaya mengonstruksi pemahaman mengenai bagaimana unsur dialogue, feedback, adaptation, dan mutual understanding diterapkan dalam penanganan polemik event institusional pendidikan yang melibatkan legitimasi lembaga negara. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas penerapan konsep komunikasi simetris dari konteks komunikasi organisasi dan krisis korporasi ke konteks polemik kompetisi pendidikan institusional yang berkembang di ruang publik digital (Rachmad, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi institusional dalam penanganan polemik LCC Empat Pilar Kalimantan Barat melalui perspektif *Two-Way Symmetrical Communication* serta mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip komunikasi simetris diterapkan dalam merespons dinamika polemik yang berkembang di ruang publik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis strategi komunikasi institusional pada polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Kalimantan Barat melalui

perspektif *Two-Way Symmetrical Communication*. Metode ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menentukan pihak yang benar atau salah dalam polemik, melainkan memahami bagaimana respons komunikasi institusional dikonstruksikan dan dipublikasikan di ruang publik. Data penelitian diperoleh dari artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir, buku akademik, dokumen resmi institusi, pernyataan resmi MPR RI, serta pemberitaan media daring yang relevan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, seleksi, reduksi, dan pengelompokan data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-interpretatif. Untuk menghindari bias media dan meningkatkan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai media, dokumen resmi, dan sumber akademik yang relevan. Informasi yang tidak memperoleh konfirmasi dari sumber lain tidak dijadikan dasar utama analisis sehingga interpretasi yang dihasilkan didasarkan pada data yang telah melalui proses verifikasi silang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dinamika Polemik dan Eskalasi Komunikasi pada LCC 4 Pilar Kalimantan Barat

Polemik pada penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat bermula pada babak final yang mempertemukan perwakilan siswa dari SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau. Berdasarkan berbagai pemberitaan media nasional, dokumentasi video yang beredar di media sosial, dan pernyataan resmi MPR RI, konflik muncul pada sesi rebutan ketika dewan juri memberikan pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam sesi tersebut, peserta dari SMAN 1 Pontianak menjawab bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden. Namun, jawaban tersebut dinyatakan tidak tepat oleh dewan juri sehingga mengakibatkan pengurangan nilai sebesar lima poin. Situasi kemudian menjadi problematis ketika pertanyaan yang sama dialihkan kepada regu lain, yakni SMAN 1 Sambas, yang memberikan jawaban dengan substansi serupa tetapi justru dinyatakan benar dan memperoleh tambahan nilai sebesar sepuluh poin (DetikEdu, 2026; Kompas.com, 2026).

Perbedaan keputusan terhadap jawaban yang dipersepsikan identik tersebut kemudian memunculkan keberatan dari peserta SMAN 1 Pontianak. Keberatan disampaikan secara langsung kepada dewan juri dengan argumentasi bahwa jawaban yang mereka sampaikan memiliki substansi yang sama dengan jawaban regu lain yang dinyatakan benar. Akan tetapi, dewan juri tetap mempertahankan keputusan sebelumnya dengan alasan bahwa terdapat perbedaan pada aspek artikulasi jawaban yang dianggap tidak terdengar secara jelas. Pada tahap ini, polemik masih berada dalam lingkup internal kompetisi dan belum berkembang menjadi isu publik yang lebih luas.

Situasi berubah ketika rekaman video yang memperlihatkan perbedaan keputusan tersebut tersebar melalui berbagai platform media sosial dan memperoleh perhatian luas dari masyarakat. Video tersebut kemudian diunggah ulang oleh berbagai akun media sosial dan diberitakan oleh sejumlah media nasional sehingga memicu munculnya beragam interpretasi publik mengenai objektivitas dan konsistensi penilaian yang dilakukan oleh dewan juri. Dalam konteks komunikasi digital, penyebaran informasi yang berlangsung secara cepat menyebabkan suatu persoalan yang pada awalnya terbatas pada ruang

kompetisi dapat berkembang menjadi diskursus publik yang melibatkan masyarakat luas sebagai pihak yang turut memberikan penilaian dan membentuk opini (CNN Indonesia, 2026).

Perhatian publik terhadap kasus tersebut tidak lagi berfokus pada benar atau salahnya jawaban peserta semata, melainkan mulai bergeser pada isu yang lebih luas, yaitu transparansi penyelenggaraan, profesionalitas panitia, serta akuntabilitas institusi yang menaungi kegiatan tersebut. Berbagai komentar yang muncul di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat mempertanyakan konsistensi standar penilaian dan mekanisme penyelesaian keberatan peserta. Dalam kondisi demikian, polemik tidak lagi dipahami sebagai persoalan teknis perlombaan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan persepsi publik yang berpotensi memengaruhi citra dan legitimasi penyelenggara. Eskalasi polemik semakin meningkat ketika sejumlah tokoh pendidikan, praktisi, dan masyarakat turut memberikan tanggapan terhadap kasus tersebut. Perbincangan di ruang digital memperlihatkan bahwa publik tidak hanya menuntut penjelasan mengenai keputusan juri, tetapi juga mengharapkan adanya respons institusional yang cepat, terbuka, dan akuntabel. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam era digital, ekspektasi masyarakat terhadap suatu institusi tidak hanya berkaitan dengan hasil suatu keputusan, tetapi juga mencakup bagaimana institusi tersebut berkomunikasi dan merespons kritik yang muncul di ruang publik.

Merespons meningkatnya perhatian masyarakat, MPR RI kemudian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas polemik yang terjadi dan mengambil langkah evaluatif dengan menonaktifkan dewan juri serta pembawa acara yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, MPR RI juga menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyelenggaraan LCC Empat Pilar agar kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang (MPR RI, 2026; Kompas.com, 2026). Langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran institusional bahwa polemik yang berkembang telah melampaui persoalan teknis perlombaan dan berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kegiatan yang membawa nama lembaga negara.

Dari perspektif komunikasi institusional, dinamika tersebut memperlihatkan bahwa polemik LCC Empat Pilar Kalimantan Barat merupakan contoh bagaimana suatu konflik persepsi dapat berkembang menjadi krisis komunikasi apabila tidak segera memperoleh ruang klarifikasi yang memadai. Keterlambatan dalam memberikan penjelasan yang komprehensif serta terbatasnya ruang dialog pada fase awal konflik menyebabkan publik membangun interpretasinya sendiri melalui informasi yang beredar di media sosial. Akibatnya, fokus perhatian masyarakat bergeser dari substansi persoalan menuju penilaian terhadap kemampuan institusi dalam mengelola komunikasi dan mempertahankan kepercayaan publik. Dengan demikian, polemik LCC Empat Pilar Kalimantan Barat tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai hasil penilaian kompetisi, tetapi juga menggambarkan pentingnya strategi komunikasi institusional dalam merespons isu yang berkembang di ruang publik. Kasus ini menjadi relevan untuk dianalisis melalui perspektif *Two-Way Symmetrical Communication* karena memperlihatkan bagaimana kebutuhan akan dialog, umpan balik, adaptasi, dan upaya membangun pemahaman bersama menjadi aspek penting dalam penanganan polemik yang melibatkan legitimasi lembaga negara.

3.2. Strategi Komunikasi Institusional dalam Penanganan Polemik LCC 4 Pilar Kalimantan Barat

Polemik pada LCC Empat Pilar Kalimantan Barat memperlihatkan bahwa konflik dalam event institusional tidak hanya berkaitan dengan substansi persoalan teknis, tetapi juga dengan bagaimana institusi penyelenggara membangun komunikasi ketika keberatan publik muncul dan berkembang. Dalam konteks ini, respons komunikasi institusional menjadi relevan untuk dianalisis karena berkaitan dengan upaya menjaga hubungan dengan publik, mereduksi konflik persepsi, serta mempertahankan legitimasi institusi di tengah tekanan opini publik. Dengan demikian, keberatan peserta terhadap keputusan juri tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk ketidakpuasan individual, melainkan sebagai situasi komunikasi yang menuntut pengelolaan institusional yang responsif dan dialogis (Chumaeson dkk., 2020).

Berdasarkan pemberitaan yang terdokumentasi di ruang publik, respons komunikasi institusional pada fase awal polemik dapat diidentifikasi melalui pernyataan-pernyataan yang beredar di media daring. Berdasarkan laporan DetikEdu (2024) dan Kompas.com (2024), respons awal penyelenggara lebih banyak merujuk pada prosedur dan kewenangan juri sebagai dasar keabsahan keputusan. Pola komunikasi ini dapat dianalisis sebagai kecenderungan procedural legitimation, yakni strategi komunikasi yang menempatkan validitas prosedur sebagai argumen utama dalam merespons keberatan. Dalam kerangka *Two-Way Symmetrical Communication* (Grunig & Hunt, 1984), kecenderungan ini menunjukkan bahwa dimensi *dialogue* yaitu keterbukaan untuk memproses keberatan sebagai masukan yang bermakna belum sepenuhnya hadir dalam respons institusional awal. Akibatnya, konflik mengalami perluasan makna: dari persoalan teknis kompetisi menjadi persoalan keadilan prosedural yang diperdebatkan publik lebih luas (Makwambeni & Matsika, 2022).

Ketiadaan ruang klarifikasi yang terbuka pada fase awal berdampak pada meluasnya interpretasi publik terhadap polemik. Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia (2024) dan Tempo (2024), keberatan peserta dan rekaman video yang beredar di media sosial memperoleh perhatian luas sebelum institusi penyelenggara mengeluarkan respons yang bersifat akomodatif. Dari perspektif *event communication*, situasi ini menunjukkan bahwa ketika saluran komunikasi institusional tidak menyediakan ruang feedback yang memadai, publik digital mengambil peran dalam membentuk narasi dominan atas peristiwa tersebut (Erfina, Sari, & Octaviani, 2023). Kondisi ini bukan semata penilaian terhadap kualitas respons institusi, melainkan gambaran dinamika komunikasi yang lazim terjadi ketika ketidakpastian informasi bertemu dengan aksesibilitas media sosial.

Pergeseran pendekatan komunikasi institusional terlihat setelah polemik memperoleh perhatian publik yang lebih luas. Berdasarkan pernyataan resmi MPR RI sebagaimana dikutip oleh Kompas.com (2024) dan DetikEdu (2024), institusi penyelenggara mengumumkan evaluasi mekanisme perlombaan, penonaktifan dewan juri dan pembawa acara, serta penyampaian permohonan maaf kepada pihak-pihak terdampak. Dalam kerangka komunikasi krisis, langkah-langkah ini dapat dianalisis sebagai bentuk *corrective action* sekaligus *relationship repair strategy*, yakni upaya institusi untuk merespons tekanan reputasional melalui pengakuan publik dan tindakan korektif yang mengindikasikan akuntabilitas kelembagaan (Coombs, 2019). Jika dianalisis melalui indikator *Two-Way Symmetrical Communication*, respons ini memperlihatkan hadirnya dimensi *adaptation* yaitu kesediaan institusi untuk menyesuaikan sikap berdasarkan

tekanan dan persepsi publik serta dimensi *feedback* yang mulai direspons secara terbuka setelah polemik berkembang di ruang publik (Grunig & Hunt, 1984; Mohamad dkk., 2025).

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pola komunikasi yang teridentifikasi dari sumber-sumber terdokumentasi menunjukkan bahwa dimensi *dialogue* dan *mutual understanding* dua indikator yang dalam teori *Two-Way Symmetrical Communication* idealnya hadir sejak awal proses komunikasi lebih tampak pada fase lanjut polemik dibandingkan fase awal. Temuan ini tidak dimaksudkan sebagai penilaian terhadap kinerja institusi, melainkan sebagai gambaran dinamika komunikasi institusional dalam situasi polemik event pendidikan yang melibatkan legitimasi lembaga negara. Dalam konteks inilah penelitian ini menemukan relevansinya: penerapan prinsip komunikasi simetris dalam konteks polemik event institusional pendidikan memiliki kekhasan yang berbeda dari konteks krisis korporasi maupun pemerintahan yang lebih banyak diteliti sebelumnya (Tresnoati, W. S. (2026).

Dengan demikian, analisis terhadap strategi komunikasi institusional pada polemik LCC Empat Pilar Kalimantan Barat menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan polemik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas merespons tekanan publik, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi yang dialogis dan akomodatif sejak tahap awal keberatan muncul. Temuan ini memperkuat argumen bahwa prinsip *Two-Way Symmetrical Communication* memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks komunikasi institusional pada event pendidikan, khususnya dalam mencegah eskalasi konflik persepsi menjadi krisis legitimasi yang lebih luas.

3.3. Analisis Komunikasi Institusional pada Polemik LCC 4 Pilar Kalimantan Barat dalam Perspektif Two-Way Symmetrical Communication

Polemik LCC Empat Pilar Kalimantan Barat merefleksikan bahwa dinamika komunikasi pada event institusional tidak pernah berdiri semata sebagai persoalan prosedural, melainkan juga berkaitan erat dengan bagaimana institusi membangun legitimasi komunikatif di hadapan publiknya. Dalam konteks ini, sengketa persepsi mengenai konsistensi penilaian tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis kompetisi, tetapi juga sebagai ujian terhadap kapasitas komunikasi institusional dalam mengelola keberatan, membangun kepercayaan, dan memelihara relasi dengan publik. Perspektif *Two-Way Symmetrical Communication* yang dikembangkan oleh Grunig & Hunt (1984) menjadi relevan digunakan karena menempatkan komunikasi bukan sebagai instrumen persuasi sepihak, melainkan sebagai proses pertukaran makna yang memungkinkan organisasi dan publik mencapai pemahaman bersama melalui dialog, penerimaan terhadap *feedback*, dan kemampuan adaptif institusi terhadap dinamika lingkungan. Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, analisis terhadap keempat indikator *Two-Way Symmetrical Communication* disajikan dalam tabel berikut sebelum diuraikan secara lebih mendalam.

Tabel 1. Analisis Komunikasi Institusional LCC 4 Pilar Berdasarkan Indikator *Two-Way Symmetrical Communication*

Indikator TWS	Fase Komunikasi	Data/Fakta Terdokumentasi	Tingkat Penerapan	Interpretasi Analitis
Dialogue	Awal konflik (9 Mei 2026)	Regu C SMAN 1 Pontianak menyampaikan keberatan secara langsung di hadapan juri dan meminta konfirmasi dari penonton; juri merespons dengan merujuk pada kewenangan penilaian dan aspek artikulasi (Kompas.com, 2026)	Parsial	Dialog hadir secara formal tetapi terbatas pada klarifikasi prosedural; belum berkembang menjadi ruang deliberasi yang memungkinkan negosiasi makna secara substantif
Feedback	Awal Eskalasi (9–11 Mei 2026)	Keberatan peserta tidak mengubah keputusan juri pada hari pelaksanaan; video protes menyebar viral di media sosial; tekanan opini publik meningkat signifikan hingga mendorong respons institusional (Kompas.com, 2026; Beritasatu.com, 2026)	Parsial → Aktif	Penerimaan <i>feedback</i> meningkat seiring eskalasi publik; mekanisme respons lebih aktif pada fase tekanan eksternal dibanding fase awal konflik
Mutual Understanding	Awal konflik (9 Mei 2026)	Perbedaan persepsi mengenai konsistensi penilaian tidak terjembatani di lokasi; protes peserta tidak memperoleh resolusi yang diterima bersama; konflik berpindah dari ruang kompetisi ke ruang publik digital (Kompas.com, 2026)	Tidak tercapai	Absennya titik temu persepsi pada fase awal menjadi faktor utama yang mendorong eskalasi polemik ke ranah publik yang lebih luas
Adaptation	Pasca-eskalasi (11–13 Mei 2026)	MPR RI menyampaikan permohonan maaf, menonaktifkan dewan juri dan MC, mengumumkan final ulang dengan juri independen, serta berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian dan tata kelola keberatan (Kompas.com, 2026; Beritasatu.com, 2026)	Aktif (reaktif)	Adaptasi hadir sebagai respons korektif pascaeskalasi; belum berfungsi sebagai mekanisme komunikasi preventif sejak fase awal konflik

Dialogue: Ruang Komunikasi antara Legitimasi dan Partisipasi

Pada indikator *dialogue*, polemik LCC Empat Pilar menunjukkan bahwa komunikasi dua arah pada dasarnya telah memperoleh ruang awal ketika peserta menyampaikan keberatan

secara langsung. Regu C dari SMAN 1 Pontianak menyampaikan keberatan kepada dewan juri dengan menyatakan bahwa mereka menjawab sama seperti Regu B, bahkan meminta konfirmasi dari penonton yang hadir di lokasi. Kehadiran momen ini mengindikasikan bahwa peserta tidak sepenuhnya diposisikan sebagai penerima keputusan pasif, melainkan masih memiliki peluang untuk menyampaikan respons atas hasil evaluasi yang dipandang problematik (Kompas, 2026)

Akan tetapi, efektivitas dialog tidak semata diukur dari keberadaan ruang bicara, melainkan dari kualitas interaksi yang memungkinkan terjadinya pertukaran argumentasi secara setara (Zakiyah et al., 2024). Juri merespons keberatan tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya tidak mendengar penyebutan "DPD" dalam jawaban Regu C, dan menambahkan bahwa artikulasi dalam menjawab merupakan hal yang telah diperingatkan sejak awal. Respons ini menunjukkan bahwa komunikasi yang berlangsung lebih berorientasi pada validasi keputusan yang telah ditetapkan dibanding eksplorasi bersama terhadap substansi keberatan. Dengan demikian, dialog memang hadir secara formal, tetapi belum berkembang menuju komunikasi simetris yang memungkinkan negosiasi makna secara lebih substantif. Kondisi ini penting dicermati karena dalam komunikasi institusional, keterbatasan ruang dialog sering kali memperbesar potensi transformasi konflik teknis menjadi konflik persepsi yang lebih luas (Page & Capizzo, 2021). Keterbatasan pada dimensi *dialogue* inilah yang secara langsung memengaruhi bagaimana *feedback* kemudian dapat atau tidak dapat dikelola secara konstruktif pada fase berikutnya (Buana, 2026)

Feedback: Dari Keberatan Individual menuju Tekanan Opini Publik

Aspek *feedback* memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks dan berkaitan langsung dengan keterbatasan *dialogue* yang telah diidentifikasi sebelumnya. Keberatan yang dilayangkan peserta di lokasi tidak mengubah keputusan juri pada hari pelaksanaan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa *feedback* awal cenderung berhenti pada level respons prosedural tanpa menghasilkan resolusi komunikasi yang mampu diterima secara *mutual*. Video momen protes peserta kemudian menyebar luas di media sosial dan menuai kritik terhadap objektivitas penilaian dalam ajang yang diselenggarakan MPR RI tersebut (Beritasatu.com, 2026)

Pada titik ini, *feedback* tidak lagi hadir sebagai respons individual peserta, tetapi berubah menjadi tekanan opini publik yang mempertanyakan transparansi dan konsistensi penyelenggaraan kompetisi. Situasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran konfigurasi komunikasi: konflik internal event bertransformasi menjadi isu legitimasi institusional (Makwambeni & Matsika, 2022). Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa ketidakberhasilan memproses *feedback* secara konstruktif pada fase awal berkontribusi langsung pada absennya *mutual understanding* indikator ketiga yang menjadi muara dari rantai komunikasi ini.

Mutual Understanding: Absennya Titik Temu Persepsi

Indikator *mutual understanding* menjadi titik paling krusial dalam membaca mengapa polemik berkembang menjadi perhatian publik yang luas, sekaligus merupakan muara dari keterbatasan pada kedua indikator sebelumnya. Dalam model komunikasi simetris, penyelesaian konflik tidak diarahkan pada kemenangan salah satu pihak, melainkan pada

pencapaian pemahaman bersama yang memungkinkan organisasi dan publik menerima hasil komunikasi secara lebih rasional (Grunig & Hunt, 1984). Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menepis anggapan adanya keberpihakan juri dan menegaskan bahwa persoalan tersebut murni disebabkan oleh kendala teknis pada sistem suara di lokasi lomba. Di sisi lain, publik dan peserta memandang terdapat inkonsistensi penilaian yang memerlukan klarifikasi lebih substantif. Ketika kesenjangan persepsi ini tidak berhasil dijembatani, konflik pun mengalami perpindahan arena dari ruang kompetisi menuju ruang publik digital (Eller, 2016; Babelinsight.id, 2026).

Fenomena ini menegaskan bahwa eskalasi polemik tidak semata dipicu oleh substansi keputusan yang dipersoalkan, melainkan oleh tidak tercapainya titik temu persepsi yang seharusnya dibangun sejak fase awal melalui *dialogue* dan *feedback* yang efektif. Absennya *mutual understanding* inilah yang kemudian memaksa institusi untuk mengaktifkan mekanisme adaptasi sebagai respons atas tekanan eksternal yang terus berkembang.

Adaptation: Respons Korektif dan Pemulihan Legitimasi Institusi

Terlepas dari keterbatasan pada fase awal komunikasi, polemik ini menunjukkan adanya kapasitas adaptif institusi setelah konflik mengalami eskalasi sebuah respons yang merupakan konsekuensi langsung dari tidak tercapainya *mutual understanding* pada tahap sebelumnya. MPR RI melalui Sekretariat Jenderal menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri, menonaktifkan dewan juri dan MC, serta berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel (Kompas.com, 2026). Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menegaskan bahwa seluruh juri dalam pelaksanaan final ulang akan diganti dengan juri independen, dan pimpinan MPR akan mengawasi langsung jalannya lomba dari awal sampai akhir. (Pojokpapua.id, 2026)

Dalam perspektif *Two-Way Symmetrical Communication*, rangkaian tindakan ini dapat dibaca sebagai bentuk *adaptation* kesediaan institusi untuk menyesuaikan kebijakan dan pendekatan komunikasinya berdasarkan tekanan dan persepsi publik. Meskipun demikian, adaptasi yang dilakukan tampak lebih bersifat korektif pascaeskalasi dibanding preventif sejak awal konflik (Sturm & Eller, 2014). Dari perspektif komunikasi krisis, pola ini menunjukkan bahwa *adaptation* baru teraktivasi setelah legitimasi institusi mulai dipertanyakan secara luas, bukan sebagai bagian dari desain komunikasi institusional yang proaktif (Frandsen & Johansen, 2020).

Guna mempertajam analisis *adaptation* dalam kerangka *Two-Way Symmetrical Communication*, polemik LCC Empat Pilar dapat dibandingkan secara analitis dengan insiden penyelenggaraan 89th Academy Awards (2017), ketika Warren Beatty dan Faye Dunaway secara keliru mengumumkan *La La Land* sebagai pemenang Best Picture, padahal pemenang sesungguhnya adalah *Moonlight* kesalahan yang baru dikoreksi lebih dari dua menit setelah pengumuman berlangsung di hadapan jutaan penonton. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyetarakan konteks kedua kasus LCC Empat Pilar melibatkan lembaga negara dengan basis legitimasi otoritas publik, sementara Academy Awards merupakan institusi industri hiburan dengan basis legitimasi reputasi profesional. Relevansi analitis perbandingan ini terletak pada perbedaan momentum dan integrasi

respons komunikasi institusional dalam kerangka TWS, bukan pada kesamaan konteks kasusnya.

Pada dimensi *dialogue* dan *feedback*, perbedaan paling signifikan terletak pada kecepatan dan keterbukaan respons awal. Koreksi atas kekeliruan dilakukan secara langsung di panggung produser *La La Land* Jordan Horowitz maju ke mikrofon, mengumumkan kesalahan, dan menunjukkan kartu bertuliskan nama *Moonlight* kepada kamera dan penonton sebagai bukti. Artinya, *dialogue* dan penerimaan *feedback* terjadi dalam ruang yang sama, pada momen yang sama, di hadapan publik yang sama. Sebaliknya, pada polemik LCC Empat Pilar, keberatan peserta yang disampaikan langsung di lokasi tidak menghasilkan perubahan keputusan pada hari yang sama respons akomodatif institusi baru muncul dua hari kemudian melalui pernyataan resmi. Perbedaan ini bukan semata soal kecepatan teknis, melainkan mencerminkan perbedaan mendasar dalam desain komunikasi institusional: apakah mekanisme *dialogue* dan *feedback* telah disiapkan sebagai bagian integral dari tata kelola event, ataukah baru diaktifkan sebagai reaksi terhadap tekanan eksternal (Frandsen & Johansen, 2020; Academy of Motion Picture Arts and Sciences, n.d.)

Pada dimensi *mutual understanding*, kedua kasus menunjukkan bahwa kecepatan tercapainya titik temu persepsi sangat ditentukan oleh transparansi dan pengakuan publik yang segera. PwC selaku firma akuntansi yang bertanggung jawab atas integritas pemungutan suara Oscars mengambil alih tanggung jawab penuh, menjelaskan secara spesifik bahwa mitranya menyerahkan amplop yang salah kepada presenter, dan mengakui bahwa protokol koreksi tidak dijalankan dengan cukup cepat (The Globe and Mail, 2017). Pengakuan yang spesifik dan transparan ini menutup ruang ketidakpastian informasi secara cepat, sehingga publik tidak memiliki celah untuk mengisi sendiri narasi atas peristiwa tersebut. Sebaliknya, pada polemik LCC Empat Pilar, penjelasan awal institusi yang merujuk pada kendala teknis tanpa detail yang memadai justru membuka ruang bagi narasi publik digital untuk berkembang dan membingkai polemik dalam kerangka ketidakadilan prosedural sebuah bingkai yang jauh lebih sulit dikelola dibanding keberatan teknis awal (Makwambeni & Matsika, 2022).

Pada dimensi *adaptation*, kedua kasus sama-sama menunjukkan respons korektif berupa evaluasi prosedur dan tindakan kelembagaan. Firma PwC tetap dipertahankan untuk mengelola pemungutan suara Oscars di masa mendatang, namun dengan prosedur baru yang ditetapkan untuk mencegah kejadian serupa terulang (Variety, 2017). Sementara pada LCC Empat Pilar, adaptasi institusional diwujudkan melalui penonaktifan dewan juri dan MC, keputusan mengulang final dengan juri independen, serta komitmen evaluasi menyeluruh. Perbedaan signifikan terletak pada momentum adaptasi: pada kasus Academy Awards, *adaptation* terjadi sebagai bagian dari respons awal yang terintegrasi dengan *dialogue*, *feedback*, dan *mutual understanding* secara hampir bersamaan; sedangkan pada kasus LCC Empat Pilar, *adaptation* muncul sebagai tahap akhir dari siklus komunikasi yang didorong oleh eskalasi tekanan eksternal, bukan sebagai bagian dari desain komunikasi yang proaktif (Sturm & Eller, 2014).

Berdasarkan keseluruhan indikator tersebut, penerapan prinsip *Two-Way Symmetrical* Communication pada polemik LCC Empat Pilar Kalimantan Barat memperlihatkan karakter yang parsial dan transisional. Unsur dialog, penerimaan terhadap *feedback*, serta adaptasi institusi pada dasarnya telah muncul, namun belum berlangsung secara optimal untuk menghasilkan *mutual understanding* sejak fase awal konflik. Oleh

karena itu, pengelolaan komunikasi pada event institusional ke depan perlu diarahkan pada penguatan mekanisme klarifikasi dialogis, prosedur keberatan berbasis evidensi, serta respons komunikasi yang lebih cepat terhadap feedback publik. Dengan pendekatan demikian, konflik teknis berpotensi dikelola secara lebih konstruktif sebelum berkembang menjadi krisis persepsi yang memengaruhi legitimasi institusi penyelenggara.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa polemik LCC Empat Pilar Kalimantan Barat berkembang tidak semata karena persoalan teknis penilaian, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika komunikasi institusional yang pada fase awal belum menghasilkan titik temu persepsi antara peserta dan penyelenggara. Temuan ini didasarkan pada analisis terhadap data komunikasi yang terdokumentasi di ruang publik, sehingga interpretasi yang dihasilkan mencerminkan pola komunikasi yang teridentifikasi dari sumber-sumber sekunder, bukan penilaian menyeluruh atas keseluruhan proses komunikasi yang berlangsung.

Melalui perspektif *Two-Way Symmetrical Communication*, penelitian mengidentifikasi bahwa unsur *dialogue*, *feedback*, dan *adaptation* pada dasarnya telah muncul dalam respons komunikasi institusional penyelenggara. Akan tetapi, berdasarkan data yang tersedia, ketiga unsur tersebut tampak belum berlangsung secara sinergis sejak fase awal konflik. Ruang keberatan peserta memang tersedia, namun komunikasi pada fase awal belum menghasilkan klarifikasi yang memadai untuk mereduksi perbedaan persepsi, sehingga polemik berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas. Sementara itu, unsur *mutual understanding* yang dalam teori TWS merupakan tujuan utama komunikasi simetris baru mulai terbentuk setelah institusi melakukan serangkaian respons korektif pada fase pasca-eskalasi.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan relevansi penguatan komunikasi institusional yang lebih dialogis, responsif, dan adaptif dalam pengelolaan event institusional, khususnya kompetisi pendidikan di bawah lembaga formal negara. Mekanisme klarifikasi terbuka, respons yang cepat terhadap *feedback*, dan prosedur keberatan berbasis evidensi berpotensi mencegah konflik teknis berkembang menjadi krisis persepsi yang memengaruhi legitimasi institusi. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas penerapan konsep komunikasi simetris ke konteks yang belum banyak dieksplorasi, yakni polemik event institusional pendidikan yang melibatkan legitimasi lembaga negara sebuah konteks yang memiliki kekhasan dinamika tersendiri dibandingkan krisis pada organisasi bisnis maupun pemerintahan yang lebih banyak dikaji dalam literatur yang ada. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara eksplisit. Penggunaan pendekatan *library research* yang bertumpu pada data sekunder menjadikan analisis terbatas pada pola komunikasi yang terdokumentasi secara publik, tanpa dapat menangkap dinamika komunikasi internal institusi maupun perspektif langsung dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, temuan penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai identifikasi pola komunikasi berdasarkan data yang tersedia, bukan sebagai evaluasi komprehensif atas keseluruhan strategi komunikasi penyelenggara. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris seperti wawancara mendalam dengan pihak penyelenggara, peserta, maupun pemangku kepentingan terkait guna memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai dinamika komunikasi institusional pada event pendidikan, serta menguji penerapan model *Two-Way Symmetrical Communication* pada konteks kasus yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Academy of Motion Picture Arts and Sciences. (n.d.). 89th Academy Awards key dates. Oscars.org. Retrieved June 25, 2026, from <https://www.oscars.org/oscars/89th-academy-awards-key-dates>
- Alamsyah, I. L., Aulya, N., & Satriya, S. H. (2024). Transformasi media dan dinamika komunikasi dalam era digital: Tantangan dan peluang ilmu komunikasi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 168–181. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/554>
- Augusta, A., et al. (2026). Symmetrical communication in public relations: A systematic literature review. *Persepsi: Communication Journal*, 9(1). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/PERSEPSI/article/view/30081>
- Azmi, N. A. (2021). Social media network analysis (SNA): Identifikasi komunikasi dan penyebaran informasi melalui media sosial Twitter. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(4), 1394–1403. <https://doi.org/10.30865/mib.v5i4.3265>
- Babelinsight.id. (2026, Mei 13). MPR RI putuskan ulang final LCC Empat Pilar Kalimantan Barat. <https://www.babelinsight.id/mpr-ulang-final-lcc-kalbar>
- Badu, E., Osei, C., & Amankwah-Amoah, J. (2023). Crisis communication and trustworthiness among crisis actors: A systematic review. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://link.springer.com/article/10.1057/s41599-023-01734-3>
- Beritasatu.com. (2026, Mei 13). 5 sosok juri dan MC LCC 4 Pilar MPR di Kalbar yang dinonaktifkan. <https://www.beritasatu.com/nusantara/2993641/5-sosok-juri-dan-mc-lcc-4-pilar-mpr-di-kalbar-yang-dinonaktifkan>
- Buana, G. (2026, May 12). Kronologi kontroversi LCC Empat Pilar MPR RI Kalbar yang viral di media sosial. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/889414/kronologi-kontroversi-lcc-empat-pilar-mpr-ri-kalbar-yang-viral-di-media-sosial>
- Chumaeson, W., Damayanto, A. P., & Larsono, J. (2020). Peran humas MPR RI dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan. *DIGIKOM: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1). <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/digikom/article/view/558>
- CNN Indonesia. (2026, May 12). Video: Polemik lomba cerdas cermat MPR, nonaktifkan juri-MC [Video]. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/tv/20260512210909-400-1358019/video-polemik-lomba-cerdas-cermat-mpr-nonaktifkan-juri-mc>
- CP, O. A. (2026, May 12). Kronologi polemik penilaian LCC MPR RI versi alumni SMAN 1 Pontianak. *detikKalimantan*. <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8486026/kronologi-polemik-penilaian-lcc-mpr-ri-versi-alumni-sman-1-pontianak>
- Dani Prabowo, A. (2026, May 12). Kronologi polemik LCC MPR di Kalbar, peserta protes nilai hingga muncul permintaan maaf. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/image/2026/05/12/073000365/kronologi-polemik-lcc-mpr-di-kalbar-peserta-protes-nilai-hingga-muncul>
- DetikEdu. (2026, May 11). Kronologi polemik cerdas cermat 4 Pilar MPR, MPR minta maaf, speaker disebut bermasalah. *Detik.com*. <https://www.detik.com/edu/sekolah>

- Eller, D. (2016). Expanding public sector communications: Moving beyond public affairs to facilitate collaborative public relations. *GSTF Journal on Media & Communications*, 3, 5. <https://doi.org/10.7603/s40874>
- Erfina, E., Sari, S., & Octaviani, V. (2023). Implementasi peran public relation dalam membangun reputasi PT Cakrawala Dinamika Energi. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 457-466. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:FciZvUpV8_kj:scholar.google.com/+peran+humas+dalam+komunikasi+konflik+di+event%5D&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2022
- Frandsen, F., & Johansen, W. (2020). Crisis communication and organizational legitimacy. In J. D. Rendtorff (Ed.), *Handbook of business legitimacy: Responsibility, ethics, and society* (pp. 707-725). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14622-1_27
- Frandsen, F., & Johansen, W. (2020). Crisis communication and organizational legitimacy. In J. D. Rendtorff (Ed.), *Handbook of business legitimacy: Responsibility, ethics, and society* (pp. 707-725). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14622-1_27
- Grunig, J. (2022). Negotiation and conflict management: Two valuable tools in the public relations toolbox. *Negotiation and Conflict Management Research*, 15(1). <https://doi.org/10.34891/20220215-542>
- Grunig, J. E. (1994). World view, ethics, and the two-way symmetrical model of public relations. In W. Armbrecht & U. Zabel (Eds.), *Normative Aspekte der Public Relations* (pp. 69-89). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-97043-5_4
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing public relations*. Holt, Rinehart and Winston. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/PERSEPSI/article/view/30081?utm_source
- Hamad, I. (2024). *Komunikasi strategis*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=yzkPEQAAQBAJ>
- IDN Times. (2026, May 12). Klarifikasi MPR soal polemik penjurian lomba cerdas cermat di Kalbar. IDN Times. <https://www.idntimes.com>
- Indonesiakini.id. (2026, Mei 21). Lomba cerdas cermat 4 pilar viral di Kalbar, MPR beri penjelasan soal juri. <https://indonesiakini.id/2026/05/21/lomba-cerdas-cermat-4-pilar-viral-di-kalbar-mpr-beri-penjelasan-soal-juri/>
- Kompas.com. (2026, May 12). Kronologi polemik LCC MPR di Kalbar: Peserta protes nilai hingga muncul evaluasi penyelenggara. Kompas.com. <https://www.kompas.com>
- Kompas.com. (2026, Mei 12). MPR nonaktifkan juri dan MC lomba cerdas cermat Empat Pilar di Kalbar. <https://nasional.kompas.com/read/2026/05/12/12545821/mpr-nonaktifkan-juri-dan-mc-lomba-cerdas-cermat-empat-pilar-di-kalbar>
- Makwambeni, B., & Matsika, B. (2022). Toward symmetry: An assessment of stockholder communication practices in South Africa. *SAGE Open*, 12(3). <https://doi.org/10.1177/21582440221116333>
- Mohamad, B., Adamu, A. A., Rahayu, S., Suciati, P., Mona, N., & Raza, S. H. (2025). An exploratory investigation on internal crisis communication across private and public sector employees in Indonesia. *Risk Analysis*, 45(8), 2341-2355. <https://doi.org/10.1111/risa.70006>

- MPR RI [@mprgoid]. (2026, May 12). Klarifikasi dan permohonan maaf terkait lomba cerdas cermat Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat [Instagram post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DYOaiZPTT07/V>
- NU Online. (2026, Mei 14). Keteledoran dewan juri LCC 4 Pilar di Kalbar cederai nilai keadilan pendidikan. <https://www.nu.or.id/nasional/keteledoran-dewan-juri-lcc-4-pilar-di-kalbar-cederai-nilai-keadilan-pendidikan-yr21L>
- Page, J., & Capizzo, L. (2021). From “an open field” to established “waves”: Public relations scholarship through the lens of Public Relations Review. *Public Relations Review*, 47(5), 102115. <https://doi.org/10.101>
- Pojokpapua.id. (2026, Mei 13). MPR putusan gelar ulang final LCC Empat Pilar Kalimantan Barat. <https://www.pojokpapua.id/mpr-ulang-final-lcc-kalbar>
- Purwatiningsih, S. D., & Situmeang, I. V. O. (2025). *Komunikasi manajemen konflik: Dalam konteks pemecahan masalah*. PT Green Pustaka Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=pLxyEQAAQBAI>
- Rachmad, Y. E. (2024). *Communication Adaptation Theory*. *Osf*, 1–7. <https://osf.io/svapk/>.
- Rachmawati, D. (2026, May 11). Kronologi polemik lomba cerdas cermat 4 Pilar yang buat Wakil Ketua MPR minta maaf. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2026/05/11/20464261/kronologi-polemik-lomba-cerdas-cermat-4-pilar-yang-buat-wakil-ketua-mpr>
- Rizal, A. A., & CP, O. A. (2026, May 12). Kronologi polemik cerdas cermat 4 Pilar, MPR minta maaf-speaker disebut bermasalah. *DetikEdu*. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8485480/kronologi-polemik-cerdas-cermat-4-pilar-mpr-minta-maaf-speaker-disebut-bermasalah>
- Siregar, F. A., & Usriyah, L. (2021). Peranan komunikasi organisasi dalam manajemen konflik. *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)*, 5(2), 163–174. <https://journal.uinsu.ac.id/index.php/idarah/article/view/147>
- The Globe and Mail. (2017, Februari 27). Film academy apologizes to Moonlight, La La Land for Oscars best picture gaffe. <https://www.theglobeandmail.com/news/world/film-academy-apologizes-to-moonlight-la-la-land-for-oscars-best-picture-gaffe/article34168125/>
- Tresnoati, W. S. (2026). Implementation of the two-ways symmetrical model of grunig and hunt on the performance of public relations of the geological agency in disaster mitigation in West Java. *Priviet Social Sciences Journal*. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i2.1497>
- Variety. (2017, April 25). Faye Dunaway explains the ‘La La Land’ & ‘Moonlight’ mix-up. <https://variety.com/2017/film/news/oscars-best-picture-mistake-faye-dunaway-la-la-land-moonlight-1202394339/>
- Zhang, X., & Lu, F. (2025). Enhancing public health policy communication through government–citizen social media interactions: The impact of replying agents, inquiry tone, and institutional trust. *Policy & Internet*, 17(1), e70000. <https://doi.org/10.1002/poi3.70000>